

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) pertama kali dilaksanakan pada bulan Desember akhir tahun 2015, dimana pada awalnya Pilkada akan dilaksanakan di 269 daerah, yang meliputi 9 provinsi, 36 kota dan 224 Kabupaten. Namun terdapat 5 daerah yang tidak jadi melaksanakan kegiatan Pilkada tersebut, diantaranya adalah Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Patangsiantar dan Kota Manado. Sehingga daerah yang melangsungkan Pilkada berubah menjadi 8 Provinsi, 222 Kabupaten, dan 34 Kota. Pada bulan Februari tahun 2017 Pemilu tahap kedua kembali dilaksanakan secara serentak, dengan diikuti oleh 101 daerah, yang meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Kemudian pada bulan Juni tahun 2018, Pilkada tahap tiga kembali dilaksanakan dengan diikuti oleh 171 daerah, yang meliputi 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.¹ Proses pelaksanaan Pilkada serentak dari tahun ke tahun tentu mengalami banyak kemajuan. Secara teknis tentunya sama seperti tahun-tahun yang lalu. Namun pada tahun 2020 pelaksanaan Pilkada serentak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada beberapa tahun sebelumnya proses pelaksanaan Pilkada dilaksanakan secara tatap muka, tapi pada tahun ini semuanya dibatasi.

Pada tahun 2020 Pilkada dilaksanakan serentak oleh 270 daerah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 32 kota. Pelaksanaan pemilihan umum kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya virus

¹ Muhammad Chabibi, “*Pertukaran Politik Calon Tunggal Dalam Pilkada (studi kasus Pilkada Kabupaten Pasuruan 2018)*”, (Depok: Gemala, 2020), hal.3

mematikan yakni *Coronavirus Disease* 2019 atau kerap yang dikenal dengan wabah Covid'19. Virus mematikan ini telah menambah Kasus kematian. Hal ini dibuktikan dengan portal berita kompas.com yang menyebutkan lebih dari 5.700 orang telah meninggal dunia dikarenakan virus tersebut. Penyebaran virus Covid'19 ini begitu cepat, hampir seluruh Dunia terjangkit oleh virus tersebut. Informasi ini langsung membuat pemerintah Negara Republik Indonesia langsung mengambil kebijakan dengan mewajibkan masyarakat Indonesia untuk dapat membatasi aktivitas kerumunan. Namun proses Pilkada tetap berjalan. Hal ini sesuai dengan keputusan **No.258/Pl.02- KTP/VI/2020** tentang penetapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil Walikota serentak tahun 2020. Dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil wali kota serentak pada tahun 2020. *Corona virus Desease2019*.²

Dapat dirangkum bahwa proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 tetap berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid'19, mulai dari pengawasan protokol kesehatan, pengawasan pembentukan tata kerja panitia pemilihan, kelompok penyelenggarapemungutan suara dan petugas pemutaran akhir data, pengawasan rekapitulasi hasil suara dan penetapan hasil pemilihan. Dengan keluarnya peraturan pemilu Nomor 04 tahun 2020 pada ayat satu (a), Pemilu dilaksanakan dengan cara³:

1. Menggunakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi

² Ilham Saputra, S.IP. Ketua KPU Pusat, <http://jdih.kpu.pusat> diakses 26 Maret 2021

³ Ilham Saputra, S.IP. <http://jdih.kpu.pusat> diakses 26 Maret 2021

hidung dan mulut hingga dagu.

2. Memastikan penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilih, dan pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilih serentak lanjutan untuk mengenakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
3. Menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat
4. Menghindari jabat tangan dan kontak fisik lainnya.
5. Cuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol sebelum melakukan pertemuan tatap muka di dalam ruangan
6. Membawa alat tulis masing-masing.
7. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik dan
8. Membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan setelah menyelesaikan pelaksanaan pengawasan, penanganan, dan penyelesaian sengketa serentak lanjutan.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau yang kerap disingkat dengan pemilu atau pilkada merupakan pemilihan yang kerap dijadikan pesta demokrasi rakyat yang dinantikan oleh masyarakat. Meski saat ini sedang merebahnya covid'19, Pemilu serentak tetap dilaksanakan. Sebanyak 16 Kabupaten dan 3 Kota melakukan Pilukada serentak di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Kemudian Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya.

Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti terselenggaranya

Pemilukada serentak tahun 2020. Kandidat pasangan calon Bupati dan wakil bupati Mojokerto ada 3, yaitu pasangan dengan nomor urut 01. Ikfina- Barra (IKBAR), pasangan dengan nomor urut 02. Yoko Priyono- Choirun Nisa (disingkat Yoni), dan pasangan dengan Nomor urut 03. Pungkasiadi-Titik Masudah (disingkat Pung-Titik).⁴

Pasangan nomor urut 01 menjadi sorotan masyarakat lantaran calon Bupati Ikfina merupakan istri dari Mustofa Kamal Pasa, mantan dari Bupati Mojokerto periode 2010-2015. Mustofa terjerat kasus korupsi pembangunan menara telekomunikasi dan gravitasi proyek di Kabupaten Mojokerto, sehingga Mustofa divonis delapan tahun penjara oleh majelis Hakim Tipikor Surabaya. Jabatan Bupati kemudian digantikan oleh wakilnya yakni Pungkasiadi. Hal ini sempat menjadi sorotan masyarakat lantaran latar belakang Ikfina Fatmawati merupakan istri dari mantan bupati dengan kasus korupsi. Meskipun selama satu tahun sang suami di dalam hotel prodeo, Ikfina Fatmawati tetap menjalankan komunikasi begitu baik dengan komunitas yang dulu didirikannya selama menjadi ibu PKK kurang lebih tujuh tahun lamanya. Ikfina tetap menjalankan aktifitas seperti biasa dengan masa jabatan yang saat itu sedang diemban.

Pada Pemilu 2020, Ikfina Fatmawati Menggandeng Muhammad Albarra yang merupakan putra sulung dari pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah Pacet sebagai wakilnya. Muhammad Albarra belum pernah sama sekali terjun ke dunia politik sebelumnya, ini adalah kali pertama Barra masuk dalam dunia politik yang kemudian dijadikan calon wakil Bupati.

Dalam Pilkada serentak lanjutan tahun 2020, pasangan Ikfina- Barra (IKBAR)

⁴ Sholeh Affandi. Ketua KPU Pusat, <https://mojokertokab.go.id/> diakses pada 25 April 2021

Menang Telak dengan memperoleh suara sebanyak 65,2%. Pasangan Ikfina-Barra (IKBAR) dapat mengalahkan paslon No urut 02 dengan perolehan nilai 16,0% dan paslon no urut 03 dengan perolehan suara sebesar 18,9%. Dalam kemenangan ini, paslon Ikfina-Barra (IKBAR) langsung melakukan sujud syukur atas perolehan suara yang didapat dan dinyatakan resmi menang untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025.⁵

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh pasangan calon Ikfina Barra (IKBAR) dalam PemiluKada sehingga bisa mendapatkan suara tertinggi dan menang mutlak.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi Politik Tim sukses dalam kampanye pemenangan pasangan calon Ikfina-Barra (IKBAR) pada PemiluKada Kabupaten Mojokerto Tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Tim Sukses dalam kampanye pasangan calon Ikfina-Barra (IKBAR) dalam pemenangan PemiluKada Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang ide maupun wawasan

⁵Insan Qoriawan, S.H,M.Pdi, Div. Teknis Penyelenggara KPU Jawa Timur, **Error! Hyperlink reference not valid.**(diakses pada 01 April 2021)

dan ilmu bagi program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan seluruh ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Komunikasi Politik.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Manfaat bagi Masyarakat: semoga dengan adanya penelitian ini, masyarakat terkhususnya yang membaca dapat mengerti tentang strategi yang digunakan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh elemen yang mengonsumsinya.
- 2) Manfaat bagi pembaca: pembaca dapat memahami bagaimana sebuah strategi digunakan dengan baik, dikemas dan kemudian dievaluasi.
- 3) Manfaat bagi penulis: penulis dapat memahami apa saja strategi yang digunakan dalam sebuah pilkada serentak Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

